

**FAKTOR PENENTU IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG TEMATIK DI
KAMPUNG JAJANAN TRADISIONAL DAN KAMPUNG JAHE
KOTA SEMARANG**

Ravi Fauzan Ashar, Hartuti Purnaweni
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisa faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dalam Implementasi Program Kampung Tematik di Kampung Jajanan Tradisional dan Kampung Jahe Kota Semarang, dengan menggunakan penggabungan 2 teori model implementasi yaitu George C. Edwards III dan Merilee S. Grindle. Penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif dengan locus penelitian di Kampung Jajanan Tradisional, Kelurahan Puduk Payung dan Kampung Jahe, Kelurahan Pleburan, Kota Semarang. Informan yang digunakan adalah Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jawa Tengah, Staf Kelurahan Puduk Payung, Staf Kelurahan Pleburan, Kelompok Masyarakat di Kampung Jajanan Tradisional Kelurahan Puduk Payung, dan Ketua RW 02 Kelurahan Pleburan. Jenis data: data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis dan Interpretasi Data dilakukan melalui Reduksi Data, Display Data, dan Pengambilan Keputusan dan Verifikasi. Teknik penguji keabsahan data adalah teknik triangulasi. Hasil dari penelitian menunjukkan faktor penentu implementasi kampung tematik ini adalah: Faktor komunikasi berjalan dengan baik, perubahan kondisi ekonomi sosial dan budaya ke arah yang lebih baik, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dan keberhasilan dari peran yang dimiliki oleh seluruh sumber daya yang dikerahkan dilaksanakan dengan baik. Saran yang dapat diberikan: Komunikasi harus terus dijaga, jenis manfaat harus diselaraskan, mengadakan kembali kerjasama dan kepatuhan dan responsivitas para pemangku kepentingan yang sudah baik harap dapat dipertahankan.

Kata kunci : Faktor Implementasi, Kampung Tematik, Keberlanjutan

Abstract

This study analyzes the factors that determine success in the Thematic Village Implementation Program in the Kampung Traditional Snacks and Ginger Village in Semarang City, using a combination of two implementation model theories namely George C. Edwards III and Merilee S. Grindle. This research is a qualitative descriptive study in Traditional Snack Village, Puduk Payung Village and Kampung Jahe, Pleburan Village, Semarang City. The informants used were the Head of the Social Planning Sub-Division of Semarang City Regional Development Planning Agency, Central Java Indonesian Architects Association (IAI), Staff of Puduk Payung Village, Pleburan Village Staff, Community Groups in Traditional Hawaiian Village Puduk Payung Village, and Chairperson of RW 02 Pleburan Village . Data types: primary and secondary data with data collection techniques: interviews, observation, and documentation studies. Data Analysis and Interpretation is done through Data Reduction, Data Display, and Decision Making and Verification. The technique of testing the validity of data is the triangulation technique. The results showed that the determinants of the implementation of this thematic village were: Communication factors went well, social and cultural economic changes in a better direction, encouraged the welfare of the community, and won from the role allocated by well-done resources. Suggestions that can be given: Communication must be maintained, the types of benefits must be harmonized, cooperation will be held again, and the stakeholders' responses and responsibilities that are already good are expected to be carried out.

Keywords: Implementation Factors, Thematic Village, Sustainability

A. PENDAHULUAN

Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang paling utama dilakukan adalah dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat oleh pemerintah, seperti kesehatan, pendidikan, rumah tinggal, dan sebagainya. Namun selain itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat juga diupayakan pemerintah dalam membentuk suatu masyarakat yang mandiri. Sehingga muncul program-program pembangunan dari pemerintah pusat ataupun daerah dengan memanfaatkan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan di daerahnya dengan berdasarkan aspek kearifan lokal (*Local Wisdom*) yang dimiliki oleh setiap daerah.

Kota Semarang sebagai Ibu Kota dari Provinsi Jawa Tengah juga sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang. Keberadaan 16 kecamatan dan 177 kelurahan di Kota Semarang memunculkan berbagai permasalahan, seperti permukiman kumuh yang ada pada titik-titik tertentu di Kota Semarang. Terlebih letak morfologi Kota Semarang yang memiliki banyak perbukitan dan di perbukitan tersebut banyak permukiman kumuh, sehingga menambah kesan kumuh dan tidak nyaman dipandang. Berdasarkan data Departemen Pekerjaan Umum, Kota Semarang masih masuk dalam 10 kota dengan kawasan kumuh terbesar di Indonesia. Pada saat itu daerah kumuh

tercatat seluas 40 hektar atau lebih banyak dari Kota Medan dengan luasan 31 hektar, meskipun lebih kecil dari Surabaya yang mencapai 59 hektar.¹

Kota Semarang yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah memiliki keunggulan sebagai daerah pusat perekonomian. Hal ini menimbulkan daya tarik bagi masyarakat yang akan mencari penghasilan di Kota Semarang. Daya tarik Kota Semarang sebagai pusat perekonomian di Jawa Tengah juga menjadi penyebab banyaknya permukiman kumuh di Kota Semarang. Permasalahan penyediaan permukiman serta permasalahan kemiskinan dan tingginya laju pertumbuhan penduduk merupakan permasalahan yang seakan tidak akan terlepas dari kehidupan perkotaan. Berdasarkan data BPS Kota Semarang, angka kepadatan penduduk di Kota Semarang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang pada tahun 2016 mencapai angka 4.289 Jiwa/Km².²

Atas dasar permasalahan diatas maka, Pemkot Semarang menanggapi permasalahan kemiskinan dan banyaknya permukiman kumuh di Kota Semarang dengan membuat program dengan

¹(<http://biz.kompas.com/read/2017/05/03/19300981/kota.semarang.contoh.penanganan.kawasan.kumuh>)

²(<https://semarangkota.bps.go.id/dynamictable/2015/04/23/5/kepadatan-penduduk-di-kota-semarang-2012--2016.html>)

menggunakan pendekatan *bottom-up*, yakni melalui program Kampung Tematik. Masa pemerintahan Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryanti Rahayu (2016-2021), Pemkot Semarang memiliki program pengentasan kemiskinan melalui Gerbang Hebat, singkatan dari Gerakan Bersama Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Melalui Harmonisasi Ekonomi, Edukasi, Ekosistem, Etos Bersama Masyarakat.³

Kampung Tematik merupakan salah satu inovasi Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengentasan permukiman kumuh dengan melibatkan peran masyarakat secara aktif melalui pemaksimalan potensi yang dimiliki oleh kampung tersebut. Namun seiring berjalannya waktu program kampung tematik berkembang menjadi program yang membuka kesempatan bagi wilayah untuk dapat memperbaiki permasalahan lain yang dialami oleh wilayahnya, baik dalam segi ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya. Melalui program kampung Tematik ini, Pemerintah Kota Semarang mewajibkan seluruh kecamatan di Kota Semarang untuk membuat minimal 2 (dua) kampung Tematik dengan tema yang berbeda.

Sejak program Kampung Tematik ini dijalankan oleh Pemerintah Kota Semarang pada akhir tahun 2016, regulasi yang mengatur tentang program kampung tematik masih berupa *Standard Operating Procedure* (SOP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik. Kemudian barulah pada tahun 2018 disahkan dalam bentuk peraturan walikota yakni Perarutan Walikota Semarang Nomor 22 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik. Perwal tersebut berisikan mengenai petunjuk pelaksanaan pembentukan program kampung tematik mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan program hingga monitoring dan evaluasi. Seluruh tahapan tersebut harus dilakukan oleh wilayah yang ingin mengajukan untuk mengikuti program kampung tematik.

Keberadaan Kampung Tematik di Kota Semarang sudah semakin banyak dan beragam yang berdasarkan potensi atau ciri khas yang dimiliki suatu kampung. Dilansir situs resmi Pemkot Semarang sudah ada 32 kampung tematik yang tersebar di 16 kecamatan di Kota Semarang. Ke-32 kampung itu memiliki tema Kampung Tematik yang berbeda-beda. Bekerjasama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jawa Tengah melalui program Arsitek Masuk Kampung (AMK), yang menempatkan 2 orang personel IAI

³(<http://semarangkota.go.id/berita/read/7/berita-kota/1368/gerbang-hebat-program-pengentasan-kemiskinan-dan-pengangguran>)

pada tiap Kecamatan di Kota Semarang untuk membantu wilayah dari pemetaan potensi, penyusunan perencanaan hingga pendampingan pelaksanaan program kampung tematik. Adapun proses pentahapan yang telah disusun oleh Pemkot Semarang dalam mengimplementasikan program kampung tematik di setiap kelurahan di Kota Semarang sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pentahapan Program Kampung Tematik

NO	Tahun	Jumlah
1	2016	32 Kampung
2	2017	80 Kampung
3	2018	65 Kampung
Total		177 Kampung

Sumber: Bappeda Kota Semarang 2017

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2016 program kampung tematik sudah diimplementasikan di 32 kelurahan atau kampung di seluruh Kota Semarang. Proses pentahapan pembangunan kampung tematik pada tahun 2017 juga telah dibangun sebanyak 80 Kampung. Selanjutnya, tahun 2018 menjadi tahun pentahapan pembangunan kampung tematik terakhir dengan target sebanyak 65 kampung tematik, dan ditargetkan di akhir tahun 2018 jumlah total kelurahan/kampung yang mengimplementasikan program kampung tematik sudah sejumlah 177 Kelurahan/kampung. Dengan demikian,

Misi Pemkot Semarang menjadi Kota bebas kumuh di tahun 2019 diharapkan dapat tercapai.

Dalam penelitian akan diambil 2 lokus penelitian yakni di Kampung Jajanan Tradisional, Kelurahan Pudak Payung dan juga Kampung Jahe, Kelurahan Pleburan, Kota Semarang, dengan melakukan studi perbandingan terhadap implementasi program kampung tematik di kedua kampung tersebut dan menganalisis lebih mendalam mengenai faktor penentu keberhasilan selama kedua kampung tersebut dijadikan sebagai kampung tematik. Kedua Kampung ini merupakan kampung yang dijadikan sebagai perwujudan program kampung tematik di Kota Semarang sejak tahun 2016.

B. KAJIAN TEORI

Administrasi Publik

Chandler dan Plano yang mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik (Keban, 2004:3). Chandler dan Plano menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang bertujuan untuk mengatur dan

melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia mendefinisikan administrasi publik sebagai seluruh penyelenggaraan yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan yang ada demi tercapainya tujuan nasional dan terlaksananya tugas pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. (Ibrahim, 2008:16). Dengan kata lain, administrasi publik dapat dipahami sebagai proses perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan politiknya, yang dikoordinasikan dan diorganisir oleh sumber daya yang ada dengan tujuan menghasilkan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan sosial.

Paradigma Administrasi Publik

Nicholas Henry (1988: 33-54) mengemukakan lima paradigma administrasi publik

- 1 Paradigma pertama, Prinsip-prinsip Administrasi Negara (1927-1937)
- 2 Paradigma kedua, Paradigma dikotomi antara politik dan administrasi (1900-1926),
- 3 Paradigma ketiga, administrasi Negara sebagai ilmu politik (1950-1970).
- 4 Paradigma keempat, administrasi Negara sebagai ilmu administrasi (1954-1970).

5 Paradigma Kelima, administrasi Negara sebagai ilmu administrasi Negara.

Bidang Ilmu Administrasi Publik memiliki dua cabang ilmu atau konsentrasi yaitu kebijakan publik dan manajemen publik. Manajemen publik memiliki fokus pada internal organisasi pada sektor publik, yakni bagaimana mengatur organisasi publik bekerja dengan optimal untuk mencapai tujuan. Sedangkan kebijakan publik berfokus pada proses-proses pembuatan keputusan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan pada sektor publik.

Kebijakan Publik

Carl I. Friedrich yang mendefinisikannya sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Nugroho, 2014: 126). Menurut RC. Chandler dan JC Plano, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik. (Tangkilisan, 2003: 1). Woll sebagaimana dikutip menyebutkan bahwa kebijakan

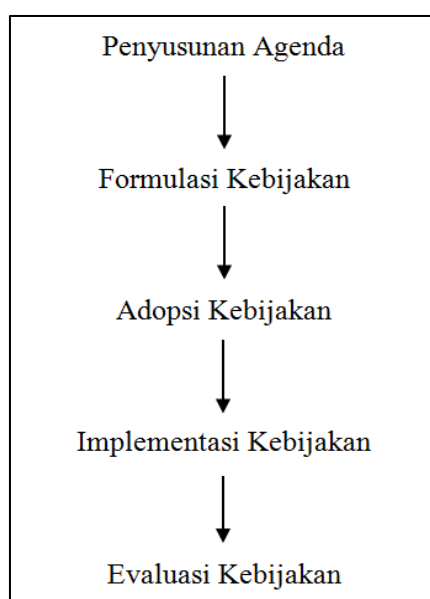
publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. (Tangkilisan, 2003: 2)

Dengan demikian kebijakan publik adalah suatu rangkaian kegiatan yang dibuat dan dilakukan oleh aparat pemerintah atas adanya permasalahan-permasalahan publik yang mencakup bidang-bidang pemerintahan dan hadir sebagai solusi atas permasalahan tersebut.

Proses Kebijakan Publik

William N. Dunn yang mengembangkan proses kebijakan ke dalam lima tahapan yaitu Penyusunan agenda, Formulasi Kebijakan, Adopsi Kebijakan, Implementasi Kebijakan dan Penilaian Kebijakan (Dunn, 1999: 22-25).

Gambar 1.1 Proses Kebijakan Publik



(Dunn, 1999: 22-25)

Implementasi Kebijakan

Definisi Implementasi kebijakan public salah satunya disampaikan oleh Merilee S. Grindle yang memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah (Winarno, 2007: 146). Sedangkan Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Agustino, 2016: 128) Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan public adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta sebagai pelaksana atas adanya sebuah kebijakan yang memiliki cara yang diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan dan sasaran yang jelas.

Model-Model Implementasi Kebijakan

Banyaknya variable-variabel yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan

terinventarisir kedalam model-model implementasi kebijakan. Pada dasarnya model-model implementasi kebijakan memiliki 2 tipe pendekatan yaitu dengan pendekatan *top-down* dan *bottom-up* menurut beberapa ahli antara lain:

1. Model Grindle (Nugroho, 2014: 671)

Pendekatan model implementasi yang disampaikan oleh Grindle lebih mendasarkan kepada pendekatan *bottom-up*. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan itu antara lain:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuat kebijakan
- e. (siapa) pelaksana program
- f. Sumberdaya yang dikerahkan

Sementara itu konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa
- c. Kepatuhan dan daya tanggap (Wibawa, 1994; Grindle, 1980)

2. Model Edwards III (Winarno, 2007: 174-203)

Edwards berpendapat bahwa “*without effective implementation the decision of policymakers will not carried out successfully*”. Model implementasi kebijakan publik yang disampaikan oleh

Edwards III menggunakan pendekatan *top-down*. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar proses implementasi menjadi efektif, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi.

- a. Komunikasi.
- b. Sumber Daya.
- c. Disposisi atau sikap.
- d. Struktur birokrasi.

Penelitian ini mengacu pada penggabungan (*Mixed*) 2 teori model implementasi yaitu yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dan Merilee S. Grindle, yang menyoroiti permasalahan penelitian tentang Implementasi Program Kampung Tematik di Kampung Jajanan Tradisional dan Kampung Jahe Kota Semarang dari sudut pandang Top-down dan Bottom-up. Adapun variabel penggabungan model implementasi kebijakan yang digunakan dari penelitian ini antara lain:

1. Komunikasi
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Sumber daya yang dikerahkan
5. Kepatuhan dan Daya Tanggap

C. METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kualitatif yang bersifat

deskriptif yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan melainkan data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata dan gambar. Peneliti memilih *locus* penelitian di Kampung Jajanan Tradisional, Kelurahan Puduk Payung dan Kampung Jahe, Kelurahan Pleburan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang dijadikan sebagai program Kampung Tematik di Kota Semarang. Kedua kampung tersebut merupakan contoh penerapan program kampung tematik yang berhasil dan gagal. Informan yang akan dilibatkan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang
2. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jawa Tengah
3. Staf Kelurahan Puduk Payung
4. Staf Kelurahan Pleburan
5. Kelompok Masyarakat di Kampung Jajanan Tradisional Kelurahan Puduk Payung
6. Ketua RW 02 Kelurahan Pleburan

Jenis data terbagi menjadi data primer dan sekunder. Dengan Teknik Pengumpulan Data wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis dan Interpretasi Data dilakukan melalui Reduksi Data, *Display* Data, dan Pengambilan Keputusan dan Verifikasi. Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah teknik triangulasi, cara yang dilakukan antara

lain: melakukan wawancara terhadap informan dan uji silang antara informasi yang diperoleh informan dengan informasi di lapangan.

D. PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik yang dilakukan oleh Kampung Jajanan Tradisional Pudukpayung dan Kampung Jahe mengalami perbedaan kondisi. Kelurahan Pudukpayung sebagai Kampung Jajanan Tradisional lebih berhasil menjalankan Perwal tersebut jika dibandingkan dengan Kelurahan Pleburan sebagai Kampung Jahe. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh:

1. Komunikasi

Komunikasi dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Informasi beserta maksud dan tujuan sebuah kebijakan atau program harus tersampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan dan sasaran kebijakan agar tidak terjadi penyimpangan selama pelaksanaan program. Terdapat tiga hal yang dikaji dalam komunikasi, antara lain (1) Pemahaman pemangku kepentingan terhadap program, (2)

Sosialisasi program, (3) Komunikasi kelurahan dengan masyarakat

a. Pemahaman pemangku kepentingan terhadap program

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas pemangku kepentingan memahami maksud dan tujuan program kampung tematik. Akan tetapi terdapat beberapa informan yang kurang memahami petunjuk pelaksanaan kampung tematik sesuai Perwal Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik. Bappeda sebagai koordinator program memahami dengan baik maksud dan tujuan program kampung tematik beserta petunjuk pelaksanaannya. Bappeda harus memahami terkait program kampung tematik, karena selaku koordinator Bappeda akan menyampaikan kembali kepada kelurahan. Kelurahan Pudukpayung dan Pleburan selaku fasilitator pelaksanaan program kampung tematik di Kampung Jajanan Tradisional dan Kampung Jahe juga dapat dikatakan memahami dengan baik. Kemudian kelurahan juga harus memberikan kembali pemahaman kepada masyarakat mengenai maksud dan tujuan kampung tematik. Pemahaman mengenai maksud dan tujuan program kampung tematik saja tidak cukup untuk melaksanakan program. Terdapat petunjuk pelaksanaan yang harus dipahami. Seperti kasus di Kampung Jahe

Pleburan yang tidak mengangkat tema kampung sesuai dengan potensi asli wilayahnya. Tema jahe melainkan timbul karena berasal dari keinginan yang dimiliki oleh salah satu pihak saja untuk memiliki kebun jahe yang kemudian dianggap akan meningkatkan perekonomian dan keindahan wilayahnya, tanpa melibatkan warga dalam menentukan tema. Berbeda dengan yang terjadi di Kampung Jajanan Tradisional yang memahami petunjuk pelaksanaan kampung tematik.

b. Sosialisasi program

Walikota melalui Bappeda Kota Semarang selaku koordinator program kampung tematik tentunya berkewajiban memberikan sosialisasi kepada kelurahan maupun masyarakat untuk mengenalkan dan memberikan pemahaman maksud dan tujuan program kampung tematik. Bappeda telah melaksanakan sosialisasi dengan baik melalui beberapa cara. Cara pertama adalah mengundang seluruh camat dan lurah selaku fasilitator program kampung tematik dalam forum sosialisasi. Lalu cara yang kedua melalui beberapa roadshow yang dilakukan oleh beberapa OPD tentang penanggulangan kemiskinan atau tema-tema yang memiliki keterkaitan dengan program kampung tematik. Langkah Bappeda dalam memberikan sosialisasi kepada kecamatan

dan kelurahan tentunya sudah tepat. Akan tetapi langkah kedua Bappeda dengan sosialisasi melalui roadshow tentu belum efektif bagi masyarakat untuk dapat memahami maksud dan tujuan program. Disinilah peran kelurahan yang juga wajib memberikan sosialisasi program kepada masyarakatnya. Masyarakat juga perlu memahami bahwa program kampung tematik ini merupakan program yang harus melibatkan masyarakat secara proaktif.

Sosialisasi program kampung tematik yang dilakukan di Kelurahan Pudukpayung dilakukan secara bersamaan saat diadakannya forum rembug warga penentuan tema kampung tematik. Namun, sebelum melalui rembug warga tentunya pihak kelurahan terlebih dahulu melakukan sosialisasi secara non-formal kepada perangkat kampung seperti Ketua RW, RT bahkan perwakilan produsen dari jajanan tradisional. Cara sosialisasi yang dilakukan oleh Kelurahan Pudukpayung juga sudah tepat dan baik daripada sosialisasi yang dilakukan oleh Kelurahan Pleburan. Sosialisasi yang dilakukan di Pleburan hanya kepada perangkat kampung saja dan tidak adanya inisiatif kelurahan untuk membuat sebuah forum sosialisasi program.

c. Komunikasi kelurahan dengan masyarakat

Komunikasi warga Kampung Jajanan Tradisional selama penyelenggaraan program kampung tematik sudah baik. Kelurahan sudah menjalankan tugasnya sebagai fasilitator program dengan mengadakan forum rembug warga untuk menentukan tema kampung tematik. Rembug warga juga merupakan langkah efektif untuk membangun komunikasi diawal penyelenggaraan program. Komunikasi yang sudah baik tersebut kemudian berhasil diteruskan dan dikembangkan oleh kedua pihak selama pelaksanaan program dan monev. Selama pelaksanaan program Kelurahan Pudukpayung sangat membantu warga menjembatani kepada pihak ketiga untuk dilakukan berbagai macam bentuk pelatihan. Sudah terbentuknya organisasi kelompok masyarakat jajanan tradisional juga mendukung kemudahan koordinasi antara kelurahan dan warga. Alhasil penyelenggaraan program kampung tematik di Kampung Jajanan Tradisional masih terus berkembang hingga saat ini.

Kondisi berbeda dengan komunikasi yang terjadi antara Kelurahan Pleburan dengan warga Kampung Jahe. Kelurahan Pleburan belum melaksanakan tugasnya dengan baik sejak awal

penyelenggaraan program. Proses perencanaan tidak ada keharmonisan antara warga dan kelurahan dalam penentuan tema kampung tematik karena tidak adanya forum atau musyawarah. Tema yang diangkatpun akhirnya tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh wilayah Pleburan. Ketidaklancaran komunikasi di Kelurahan Pleburan alhasil berdampak pada pelaksanaan program kampung tematik di Kampung Jahe saat ini sudah tidak berjalan. Tidak ada bantuan pelatihan yang diberikan kepada warga dan sudah tidak adanya lagi upaya pengawasan yang dilakukan kelurahan, terlebih untuk dapat kembali membangkitkan semangat warga Kampung Jahe dalam menjalankan program kampung tematik.

2. Jenis Manfaat Yang Akan Dihasilkan

Jenis manfaat program kampung tematik yang akan dihasilkan di Kampung Jahe Pleburan tidak seperti Kampung Jajanan Tradisional. Kelurahan Pleburan tidak berhasil membangun partisipasi masyarakat selama penyelenggaraan program kampung tematik. Ketidaksesuaian tema kampung dengan potensi wilayah juga disebabkan karena tidak dilibatkannya masyarakat dalam penentuan tema kampung tematik. Akibatnya, potensi yang asli dari wilayah

Kelurahan Pudukpayung dibidang kuliner tidak berhasil dimaksimalkan.

4.2.3 Derajat perubahan yang diinginkan

Program kampung tematik memiliki skala yang jelas terkait tujuan yang hendak dan ingin dicapai. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Semarang merupakan perubahan utama yang diharapkan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari penghasilan, pendidikan, kesehatan dan rumah tinggal. Peningkatan omset penjualan produsen jajanan tradisional sejak adanya program kampung tematik berhasil merubah kualitas hidup warga sekitar. Terbukanya peluang kerja menjadi faktor pendukung keberhasilan tersebut. Sementara itu, derajat perubahan yang diinginkan oleh Kelurahan Pleburan melalui tanaman jahe masih tidak sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. Meskipun jahe bukanlah tema yang layak, seharusnya konsep penanaman jahe di Pleburan jangan diletakkan dilahan besar, melainkan dengan konsep *urban farming* yaitu konsep memindahkan pertanian konvensional ke pertanian perkotaan, yang memiliki perbedaan pada pelaku dan media tanamnya.

3. Sumber Daya Yang Dikerahkan

Pelaksanaan program kampung tematik dapat berjalan dengan baik apabila sumber daya yang dikerahkan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan perannya masing-masing. Kesinergisan antar sumber daya yang ada juga akan mempengaruhi keberhasilan program. Dalam program kampung tematik di Kota Semarang, SDM yang berperan antara lain Bappeda Kota Semarang, IAI (Ikatan Arsitek Indonesia) Jawa Tengah, OPD terkait dan CSR hingga warga kampung itu sendiri. Sedangkan sumber daya finansial yang ada pada program kampung tematik adalah berasal dari APBD Kota Semarang sejumlah 200 Juta rupiah bagi kampung yang menjalankan program kampung tematik.

Bappeda Kota Semarang selaku Badan dalam tata laksana pemerintahan daerah berperan sebagai koordinator setiap kebijakan atau program yang ada di Kota Semarang terkait pembangunan. Termasuk peran Bappeda sebagai koordinator program kampung tematik. Bappeda juga bertugas untuk menyusun kebijakan terkait program kampung tematik, yang kemudian dibentuklah Perwal Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik. Program kampung tematik yang dimulai penyelenggaraannya pada akhir tahun 2016 dinilai masih sangat prematur.

Pada saat itu Bappeda belum membentuk regulasi yang formal sebagai pedoman penyelenggaraan kampung tematik. Sehingga banyak kampung tematik yang dibentuk pada tahun 2016 yang saat ini sudah tidak berjalan, salah satunya adalah Kampung Jahe Kelurahan Pleburan. Akan tetapi, secara keseluruhan peran Bappeda sudah cukup baik. Bappeda telah melakukan sosialisasi program baik pada tingkat aparat pemerintah maupun langsung kepada masyarakat. Hanya saja ketidaksesuaian waktu penyelenggaraan evaluasi program yang dilakukan oleh Bappeda masih menjadi kekurangan lain dari Bappeda selaku koordinator.

Bappeda tentu tidak bekerja sendirian, terdapat kelurahan yang berperan sebagai fasilitator program. Kelurahan merupakan kepanjangan tangan dari Bappeda dalam penyelenggaraan program kampung tematik. Sebagai fasilitator pihak kelurahan memiliki tugas yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan program kampung tematik. Tugas tersebut antara lain, menyelenggarakan rembuk warga untuk menentukan tema kampung tematik, melaksanakan monitoring, memfasilitasi warga dalam menerima pelatihan, dan mengatur alokasi anggaran APBD yang disalurkan bagi kampung yang menjalankan program kampung tematik.

Kelurahan Pudukpayung sudah menjalankan perannya dengan baik, sehingga saat ini program kampung tematik di Kampung Jajanan Tradisional sampai saat ini masih berjalan dan terus berkembang. Namun, Kelurahan Pleburan dinilai masih belum menjalankan perannya sebagai fasilitator. Semangat masyarakat yang sudah pudar untuk menjalankan program kampung tematik dan pihak kelurahan pun gagal untuk membangkitkan kembali semangat itu.

Selain itu sumber daya yang dikerahkan adalah Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Tengah yang berperan sebagai pendamping penyelenggaraan program kampung tematik. IAI Jateng mendampingi melalui program Arsitek Masuk Kampung, setiap kecamatan akan didampingi oleh 2 arsitek. Walikota Semarang melakukan perjanjian dengan pihak IAI Jateng untuk dapat membantu menjalankan program. Akan tetapi pendampingan yang diberikan hanya terjadi di kampung tematik tahun 2017. IAI tidak memberikan pendampingan pada kampung tematik yang diselenggarakan tahun 2016 dan 2017, termasuk Kampung Jajanan Tradisional dan Kampung Jahe yang berdiri tahun 2016. Pendampingan oleh IAI diantaranya mendampingi kelurahan dan warga dalam proses perencanaan program dan penentuan tema

kampung tematik. Sangat disayangkan kerjasama yang dilakukan oleh IAI hanya terjadi 1 tahun saja, bahkan tidak dimulai saat awal tahun penyelenggaraan.

Selama tahap pelaksanaan program, program kampung tematik juga dibantu oleh OPD dan CSR yang berperan sebagai pendukung. OPD yang dimaksud adalah OPD yang terkait dengan tema kampung tematik. Sedangkan CSR yaitu berasal dari perusahaan-perusahaan swasta dengan program sosial kemasyarakatan. OPD dan CSR memberikan bantuan berupa pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas bagi warga kampung untuk mengembangkan program kampung tematik di wilayahnya. Pelatihan yang diberikan oleh CSR juga memiliki standar tersendiri, karena tentunya sebagai pihak swasta mengedepankan keuntungan.

4. Kepatuhan dan Responsivitas

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah kepatuhan dari para pelaksana untuk mengikuti regulasi yang dijadikan pedoman selama pelaksanaan kebijakan. Sebagai regulasi yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan program kampung tematik, Perwal Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik sudah seharusnya dipatuhi teknis pelaksanaannya oleh seluruh pelaksana program. Secara umum, Bappeda dan

pemangku wilayah cukup mematuhi Perwal sebagai pedoman pelaksanaan kampung tematik. Hanya saja dilapangan masih terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan Perwal, khususnya yang terjadi di Kampung Jahe Kelurahan Pleburan. Yang pertama adalah ketidaktepatan Bappeda dalam memverifikasi tema di Kelurahan Pleburan. Lalu yang kedua adalah Kelurahan Pleburan tidak melaksanakan rembung warga yang seharusnya itu menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program kampung tematik. Respon positif masyarakat dapat terlihat dari antusiasme mereka dalam menyambut dan menjalankan program kampung tematik. Antusiasme masyarakat di Kelurahan Pudukpayung masih bertahan hingga kini, dari pada masyarakat Kelurahan Pleburan yang saat ini sudah tidak antusias untuk menjalankan program kampung tematik di wilayahnya.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menjadi penentu keberhasilan implementasi program kampung tematik di Kampung Jajanan Tradisional dan Kampung Jahe Kota Semarang, yaitu:

1. Faktor komunikasi berjalan dengan baik antara warga Kampung Jajanan Tradisional dengan aparat kelurahan

mulai dari perencanaan program hingga monev.

2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan dari pelaksanaan program kampung tematik di Kampung Jajanan Tradisional berupa perubahan kondisi ekonomi sosial dan budaya juga telah tercipta ke arah yang lebih baik.
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat menjadi derajat perubahan yang diharapkan dari program kampung tematik. Di Kampung Jajanan Tradisional berhasil menciptakan lapangan kerja baru akibat meningkatnya jumlah produksi para produsen jajanan tradisional
4. Kepatuhan dan responsivitas para pemangku kepentingan, Keberhasilan Kampung Jajanan Tradisional Kelurahan Pudukpayung juga tidak terlepas dari peran yang dimiliki oleh seluruh sumber daya yang dikerahkan dilaksanakan dengan baik, dengan bersinergi satu sama lain, Kesinergisan tersebut kemudian direspon positif oleh warga Pudukpayung sebagai pelaksana atau sasaran kebijakan. Seluruh sumber daya tersebut juga cukup mematuhi Perwal Nomor 22 Tahun 2018 tentang Juklak Kampung Tematik

Saran

1. Komunikasi yang berjalan dengan baik antara kelurahan dan masyarakat harus terus dijaga
2. Jenis manfaat yang dihasilkan harus diselaraskan dengan ketepatan potensi dan tema kampung tematik
3. Mengadakan kembali kerjasama dengan Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Jateng untuk dapat memberikan pembinaan kepada kampung yang belum berhasil atau kepada kampung yang berminat mengajukan untuk menjadi program kampung tematik
4. Kepatuhan dan responsivitas para pemangku kepentingan yang sudah baik harap dapat dipertahankan dan kembali menularkan atau mereplikasi semangat tersebut bagi kampung-kampung tematik yang belum berhasil dan kampung yang ingin mengajukan untuk mengikuti program kampung tematik.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Soetomo. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Akan Muncul Antitesanya?*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung
- Sujarweni, V Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Pustakabarupress: Yogyakarta
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2015. *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara: Jakarta
- Akbar, Husaini Usman Dan Purnomo Setiady. 2000. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Ibrahim, Amin. 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya*. Bandung: Mandar Maju
- Riswandi. 2009. *Ilmu komunikasi*. Jakarta : Graha Ilmu

- Sri Kumala, Fitri Yusman, “Kajian Karakteristik dan Metode Penanganan Kawasan Kumuh (Studi Kasus: Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang”, *Jurnal Teknik PWK Volume 3 No. 2* 2014
- Cindy Citya Dima, “Konsep Kampung Tematik Kavling Agrowisata Syariah Kota Semarang”, *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Paper Unisbank Ke-3* 2017
- Indah Dwi Lestari, Ir. Agung Sugiri MPST, “Peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Podosugih Kota Pekalongan”, *Jurnal Teknik PWK Volume 2 Nomor 1* 2013
- Thomas Meredith, Melanie MacDonald, “Community-supported slum-upgrading: Innovations from Kibera, Nairobi, Kenya”, [Habitat International](#). Feb2017, Vol. 60, p1-9. 9p.
- Donny Wahyu Wijaya, “Perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh studi penentuan kawasan prioritas untuk peningkatan kualitas infrastruktur pada kawasan pemukiman kumuh di Kota Malang”, *JIAF Vol. 2, No. 1*, pp 1-10, 2016
- Hartuti Purnaweni, “Revitalization of Slum Area in Semarang City with Thematic Village Program (A Case Study in Bandarharjo Village, Indonesia)”, *Advances in Economics, Business and Management Research (AEBMR), volume 43 International Conference on Administrative Science (ICAS 2017)*
- Atkočiū nienė , V., & Kaminaitė , G. (2017). The drivers of thematic village’s development in strengthening their vitality. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructu re Development*, 39(2), 139– 147. doi:10.15544/mts.2017.10.Vol.
- Anindya Putri Tamara, Mardwi Rahdriawan. (2018). Kajian Pelaksanaan Konsep Kampung Tematik di Kampung Hidroponik Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. *Jurnal Teknik PWK Volume 6 Nomor 1* April 2018
- Idziak, W., Majewski, J., & Zmys lony, P. (2015). Community participation in sustainable rural tourism experience creation: A long-term appraisal and lessons from a thematic villages project in Poland. *Journal of Sustainable Tourism*, 23(8–9), 1341–1362. doi:10.1080/09669582.2015.1019513.
- Fosso, A., & Kahane, R. (2013). Urban and peri urban horticulture in Namibia. *Acta Horticulturae*, 1007, 821– 827. doi:10.17660/ActaHortic.2013.1007.98.
- Kłoczko-Gajewska, A. (2013). General characteristics of thematic villages in Poland. *Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development*, 2(2), 60–63. doi:10.2478/vjbsd-2013-0012.
- Anissa Kinanti. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Tematik (Studi Kasus Kampung Tahu Tempe Gumregah di Kelurahan Lamper Tengah, Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies Vol 8 No. 02*
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang 2016

